

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abby, F. 2016. "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan." *Al-Adl* 8(3): 225070.

Supriadi, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

F, Keifer GEffenberger. 1967. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Gayo, Ahyar Ari. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))." *De Jure jurnal penelitian hukum* 18(3): 15.

Harahap, ALFF. 2020. *Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)*.

Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Jasimr, Jasmir. 2018. "Pengembalian Status Hukum Tanah Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Guna Usaha." *Soumatera Law Review* 1(1): 92.

Lakburlawal, Mahrita Aprilya. 2016. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Diberikan Hak Guna Usaha."

ADHAPER:

Muhammad, Bushar, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ngakan, Putu Oka et al. 2005. *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan*. Bogor: CIFOR.

Pahlefi, P. 2011. "Sengketa Tanah Hgu Antara Pt. Pagilaran Dengan Petani Di Kabupaten

Batang Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2(2): 43262.

Rwa, Mas. 2017. “Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi.” Kertha Patrika 39(2): 108.

Syukur, Muhammad. 2020. “Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26(8): 951–65.

Taufik, Nur Fadhilah Amir. 2020. “Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora.” KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora 1(1): 75–84.

Utomo, Laksanto. 2019. Hukum Adat, Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014